

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.

Isu yang muncul akhir-akhir ini bertalian dengan era perdagangan bebas yang semakin kompetitif dan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas seiring dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi. Indonesia dihadapkan dengan dua keadaan tersebut. Pertama, dimana era perdagangan sudah menuju kepada era perdagangan bebas baik perdagangan regional maupun internasional. Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan syarat utama untuk menghadapi tuntutan era perdagangan bebas dan era globalisasi.

Pada era perdagangan bebas dan era globalisasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik perubahan ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Menurut Tofler dan Naisbit (Wena, 1996:103) pada masa yang akan datang tahun 2000 akan terjadi gelombang era informasi di mana kehidupan dunia dipengaruhi oleh teknologi informasi dan diramalkan akan ada sepuluh kecenderungan yaitu bom ekonomi global, renaisans dalam seni, sosialisme pasar bebas, gaya hidup global dan nasionalisme kultural, penswastan negara, kesejahteraan, kebangkitan tepi Pasifik, dasa warsa wanita dalam kepemimpinan, abad biologi, kebangkitan agama milenium baru dan kejayaan individu. Semua itu akan selalu mempengaruhi kehidupan manusia.

Sementara itu menurut Nasution (1996:6) Indonesia menghadapi kecenderungan situasi internasional yang harus diantisipasi yaitu :

- Adanya kesepakatan GATT dan WTO dengan konsekuensi pasar dalam negeri akan semakin terbuka bagi produk industri dan jasa dari luar.
- Timbulnya kelompok-kelompok perdagangan antar negara yang cenderung menerapkan diskriminasi perdagangan anggotanya seperti NAFTA, Pasar Tunggal Eropa (ESM) dan sebagainya.
- Semakin menguat isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup maupun korupsi yang dimanfaatkan negara-negara maju untuk menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dalam bidang ekonomi (ekspor-impor, pinjaman luar negeri dan lain-lain) yang nampaknya dapat melemahkan daya saing regional.

Suryadi (1993) memandang kecenderungan tantangan tidak hanya internasional melainkan nasional, seperti : “ kependudukan, perluasan pendidikan, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan industri, dominasi peranan sektor swasta dalam perekonomian, meningkatnya partisipasi politik dan perubahan perilaku masyarakat”. Sedangkan Pakpahan (Supriyadi, 2002:222-223) berpendapat bahwa : memasuki Pelita VI dalam pendidikan khususnya pendidikan kejuruan terdapat hambatan fundamental (konsepsi) dan operasional serta wawasan pembangunan sumber daya manusia dinilai kurang sejalan. Wena (1996:124) mengemukakan bahwa lulusan persekolahan belum memperkuat jajaran industri dalam negeri.

Kedua kecenderungan baik masalah internasional maupun nasional perlu diperhitungkan dan dipersiapkan, sehingga langkah-langkah seperti perbaikan mutu pekerja, efisiensi, produktivitas dan fleksibilitas tenaga kerja menjadi harapan dan tumpuan. Dalam menghadapi dua kecenderungan (internasional dan

nasional), maka mutu dan fleksibilitas pekerja, efisiensi, dan produktivitas sebagai faktor penentunya adalah kualitas manusia. Hal ini seperti yang tertuang dalam GBHN 1983 bahwa penempatan pembangunan sumber daya manusia merupakan posisi penting dan strategis.

Perkembangan akhir-akhir ini kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber alam akan tetapi, lebih menekankan kepada kemampuan manusia yang handal dan terampil yaitu sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Solaeman bahwa : (2001)

Sekarang kesejahteraan, kemajuan dan kehormatan suatu bangsa tidak ditentukan oleh kekayaan akan sumber alam, luas wilayahnya, serta besarnya jumlah penduduk tetapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Jepang, Korea Selatan dan Singapura menjadi negara maju, sejahtera dan terhormat walaupun miskin sumber alam, wilayahnya relatif tidak luas, karena memiliki sumber daya manusia berkualitas.

Sementara itu Suryadi (1999:3) mengatakan :

Pendekatan pembangunan yang lebih menyadarkan pada peranan sumber daya alam (SDA) tidak tepat lagi karena ketersediaannya semakin terbatas, terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Pembangunan harus lebih mengandalkan kekuatan SDM yang mampu menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan sesuai dengan perkembangan iptek dalam mengolah sumber alam yang tersedia dalam rangka memperluas basis partisipasi masyarakat untuk berusaha dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Ternyata ukuran keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas selain mempunyai kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber alam seoptimal mungkin termasuk di dalamnya adalah manusia yang mempunyai tingkat melek huruf yang tinggi yaitu tingkat

pendidikan tinggi dan penguasaan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang dibekali dengan keterampilan profesional dapat dijadikan sebagai jaminan terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan era globalisasi.

Sudah tidak dapat diabaikan lagi betapa pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalamantisipasi era perdagangan bebas dan era globalisasi, karena itu pemerintah pun menyadari bahwa langkah untuk mempersiapkan manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pendidikan adalah pendidikan sekolah menengah kejuruan yang diharapkan dapat memenuhi sesuai dengan era perdagangan bebas karena lulusannya dipersiapkan untuk kerja. Hal ini seperti dikemukakan Sidi bahwa :

Sekolah Menengah Kejuruan dirancang dan disusun secara dinamis dan fleksibel agar mampu mengantisipasi dan sekaligus mengikuti berbagai perkembangan jaman yang terjadi. Karena itu sejak awal diimplementasikan, kurikulum SMK selalu terbuka terhadap berbagai penyempurnaan yang selain menekankan pada pemberian bekal kemampuan daya suai dan pengembangan diri tamatan, lebih berorientasi kepada kebutuhan pemakai tamatan (*demand driven*) terutama dengan diterapkannya pola penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda.

Jadi sangatlah strategis dalam menghadapi era perdagangan bebas, era globalisasi, dan kompetisi adalah lulusan *Sekolah Kejuruan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan* dinilai cukup relevan karena sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu jalur pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah (terlibat langsung dalam proses produksi) serta lulusannya dituntut memiliki keahlian profesional.

Kerelevanan dan tuntutan keprofesionalan dapat kita lihat dari sisi filosofi dan pengertian yang dikemukakan oleh pakar kejuruan maupun dalam undang-undang. Rupert Evans (<http://www.dikmenjur.go.id> 5 Mei 2001), Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, filosofi dan pengertian lulusan sekolah menengah kejuruan merupakan lulusan terdidik yang dibekali dengan keterampilan tertentu, mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu yang berorientasi kepada dunia kerja.

Namun kenyataan yang ada, bahwa sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi sumber daya manusia berkualitas, tenaga profesional maupun kurikulum yang luwes masih belum sesuai dengan harapan iklim industri untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan selai berada pada bidang tarik menarik antara permintaan masyarakat akan kualifikasi kejuruan dan permintaan dunia usaha akan tenaga kerja yang berkualifikasi. Akibatnya timbul konflik penentuan prioritas tujuan. Satu pihak menekankan kuantitas, pihak lain menitik beratkan kualitas (Uwe dan Djajang, 1993:82-83).

Bahkan akhir-akhir ini keberadaan sekolah menengah kejuruan di tengah-tengah masyarakat semakin pudar dan adanya kecenderungan di mana masyarakat semakin enggan memasuki sekolah menengah kejuruan. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Popularitas sekolah menengah kejuruan (SMK) relatif tergeser. Kekurang popularitasan sekolah menengah kejuruan ini disebabkan nilai prestiseny :

cenderung menurun dan sekolah kejuruan relatif sulit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. (<http://www.dikmenjur.go.id> Mei, 2001). Pada tahun 1960-an popularitas sekolah menengah kejuruan menjadi suatu kebanggaan karena outputnya cukup dibanggakan, tetapi saat ini justru sebaliknya sekolah umum cenderung berkembang lebih baik. Investasi penyelenggaraan pendidikan menengah umum berkembang lebih cepat sehingga jumlah murid sekolah menengah umum semakin dominan dan pada tahun 1992/1993 mencapai dua pertiga (65.92%), sementara proporsi siswa sekolah menengah kejuruan terus menurun hingga mencapai sekitar sepertiga (34.08%) dari seluruh sekolah menengah (Suryadi, 1999:180-181).

2. Lulusan sekolah menengah kejuruan belum mempunyai sertifikasi keahlian yang dikeluarkan dari institusi tertentu yang sudah diakui keberadaannya dan dapat menjamin kepercayaan bagi lulusannya. Akibat belum memiliki sertifikasi keahlian, perusahaan masih ragu-ragu terhadap lulusannya walaupun legitimasi ijazah dari sekolah secara formal ada dan dapat dibuktikan. Namun lain halnya dengan negara maju seperti Jerman, selain mempunyai ijazah formal sekolah, siswa juga mempunyai sertifikasi keahlian yang disebut Meister yang dikeluarkan oleh institusi tertentu dan dapat menjamin bahwa siswa atau lulusan tersebut mempunyai keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meister merupakan jenjang kualifikasi nonakademis bergengsi di Jerman, hanya dengan berbekal sertifikat

tersebut. lulusan mempunyai rasa percaya diri serta perusahaan sangat percaya akan kemahirannya. (Uwe dan Djajang, 1993:4).

3. Lulusan sekolah menengah kejuruan umumnya dianggap *belum siap pakai* untuk terjun ke dunia kerja. Lulusannya belum siap pakai dikarenakan kurang memiliki keterampilan dalam bidang bahasa, matematika dan kerja kelompok. Profil tamatan sekolah menengah kejuruan masih dirasakan *belum siap* untuk mengadaptasi baik secara pribadi maupun sosial. Belum siap secara pribadi yaitu kompetisi yang meliputi kreativitas, ketekunan, kemampuan memikul tanggungjawab, sikap profesional, kemampuan kejuruan dan rasa percaya diri serta memiliki kecerdasan emosional. Sedangkan belum siap secara sosial yaitu kemampuan bekerja secara efisien dalam kelompok (<http://www.dikmenjur.go.id> : Mei 2001). Menurut Wena (1996:49) dan Farida lulusan belum mampu seperti yang diharapkan dunia industri atau dunia kerja dan tidak sesuai atau tidak dapat memenuhi kualifikasi jabatan (profesi) yang diperlukan dunia kerja serta sekolah baru sampai pada taraf menyiapkan tamatan siap latih.
4. Kurikulum yang belum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Kurikulum yang belum dapat menyesuaikan diri itu diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu cepat. Sekolah tidak sanggup mengikuti perubahan kemajuan ilmu dan teknologi di masyarakat (Nasution, 1982:111-112). Sementara itu proses penyesuaian kurikulum ke dunia kerja relatif sulit, seperti yang diungkapkan oleh Uwe dan Djajang (1993) bahwa



Kurikulum pendidikan formal pun kurang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pekerja terampil yang sangat diperlukan untuk produksi, karena terlalu berorientasi pada teori, sehingga pengetahuan yang disampaikan kepada siswa sedikit saja yang dapat diaplikasikan pada praktek guna mengembangkan keterampilan. Akibatnya perusahaan Indonesia yang relatif muda sangat sulit untuk bersaing di pasar internasional karena kurangnya tenaga terampil.

Kemudian antara kurikulum dan dunia kerja belum ada keselarasan, lulusan belum dapat mengisi lowongan kerja sehingga menimbulkan kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dalam materi pembelajaran teori harus terkait dengan pengajaran di industri terutama dalam kegiatan praktek (*practise make perfect*) akan tetapi, untuk mewujudkannya merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Sementara itu kaitannya dalam bentuk pembelajaran industri di Indonesia belum mempunyai instruktur yang secara khusus menangani masalah pendidikan sistem ganda. Umumnya instruktur belum memiliki pelatihan tentang proses belajar mengajar, padahal seharusnya dituntut mempunyai kemampuan metodologi pengajaran karena untuk mengelola dan mengevaluasi hasil proses belajar siswa (Wena, 1996: 93-94).

5. Sarana yang ada di sekolah masih terbatas. Terbatas di sini diartikan bahwa peralatan-peralatan yang merupakan unsur pendukung utama dalam meningkatkan kemahiran dan keterampilan siswa, misalnya komputer (untuk siswa SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen), mesin bubut, teodolit, alat elektronik (untuk siswa SMK bidang keahlian Teknik), mesin jahit atau mesin obras (untuk siswa SMK bidang keahlian Tata Busana),

alat-alat laboratorium untuk sekolah farmasi (SMK bidang keahlian Kimia) dan sebagainya masih dirasakan kurang. Selain masih terbatas, seandainya ada sarana dipersekolahan itu pun masih relatif tertinggal jauh dengan perkembangan dunia industri. Dengan kata lain peralatan atau sarana keterampilan ketinggalan jaman. Misalnya di perusahaan sudah menggunakan komputer pentium sampai kepada multi media termasuk internet sedangkan sekolah kejuruan masih jauh tertinggal, jangankan sampai internet komputer jenis pentium boleh dikatakan masih cukup jarang. Alasan utama kurangnya sarana pendukung tersebut disebabkan keterbatasan dana. Pengadaan peralatan tersebut memerlukan investasi dan biaya pemeliharanya cukup besar. Kenyataannya bahwa biaya untuk operasional sekolah menengah kejuruan 40 % lebih tinggi daripada sekolah menengah umum. Oleh karena itu, pemerintah dalam pengembangan sekolah menengah kejuruan perlu pertimbangan yang mendalam (<http://www.dikmenjur.go.id>, Mei 2001)

6. Tenaga pengajar sekolah menengah kejuruan kurang mempunyai keterampilan. Tenaga pengajar kurang terampil disebabkan antara lain: pertama, hampir keseluruhan tenaga pengajar tidak mempunyai pengalaman praktek di industri, sehingga mereka kurang mampu mengajar secara realistis. Hal ini disebabkan tenaga pengajar di SMK-SMK adalah lulusan institut atau universitas yang bukan difokuskan untuk praktek ke industri akan tetapi lebih diorientasikan untuk mengajar dan mendidik anak di



sekolah. Konsekuensinya keterampilan gurunya terbatas. Kedua, walaupun secara teoritis tenaga pengajar sudah mencukupi, tapi kenyataan setelah memasuki sekolah, tenaga pengajar dihadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung yang ada, maka secara tidak langsung menyebabkan tenaga pengajar cukup kesulitan untuk memberikan visualisasi dan demonstrasi kepada siswa. Ketiga, tenaga pengajar jarang mengikuti kursus keterampilan-keterampilan atau pelatihan-pelatihan, misalnya yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja. Walaupun tenaga pengajar berminat, tetapi keterbatasan dalam biaya kursus. Untuk mengikuti keterampilan maupun pelatihan membutuhkan biaya besar sementara sekolah tidak sepenuhnya dapat menyediakan dana. Sedangkan yang diungkapkan Slamet (Made, 1996:93) kesulitan muncul karena selama ini guru-guru sekolah kejuruan tidak pernah atau mau belajar di dunia industri. Pengajaran sekolah tidak memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan dunia industri. Hal ini tentu terkait dengan dengan pengembangan kurikulum sekolah kejuruan yang kurang menekankan pada analisis kebutuhan (*need assesment*) tenaga kerja di pasar kerja dan sistem ketenagakerjaan.

7. Pendapatan orang tua siswa relatif kurang. Hal ini cukup berpengaruh terhadap siswa pada saat akan praktek, siswa memerlukan peralatan yang tergolong cukup mahal. Sementara keterbatasan pendapatan orang tua menyebabkan siswa belum memiliki peralatan praktek, seperti seperangkat meja gambar (untuk siswa SMK bidang keahlian Teknik), seperangkat

komputer (untuk siswa SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen) atau bahan tata boga dan tata busana (untuk siswa SMK bidang Tata Busana). Secara tidak langsung keadaan tersebut dapat menghambat kepada proses belajar mengajar dan kemampuan keterampilan anak, sedangkan kemahiran keterampilan sangatlah tergantung oleh sarana tersebut.

8. Sebagian minat siswa yang rendah. Sejalan dengan keterbatasan pendapatan orang tua siswa dalam memasuki sekolah menengah kejuruan, siswa belum tentu sepenuhnya berminat kepada sekolah kejuruan, tapi siswa lebih merasakan dan mengukur keterbatasan orang tua terutama kemampuan ekonominya, sehingga mereka berpikir untuk memasuki dunia kerja merupakan pilihan terbaik agar lebih cepat bekerja dan dapat mengurangi beban orang tua. Walaupun mereka sadar bahwa keterampilan yang mereka miliki masih belum memuaskan, namun kondisi demikian harus menjadi pilihan. Kondisi itu didukung kehendak orang tua agar anaknya memasuki sekolah menengah kejuruan bukan memprioritaskan keterampilan setelah lulus sekolah, namun lebih cenderung agar setelah menamatkan sekolah diharapkan dapat bekerja dan mengurangi beban orang tuanya. Selain itu alasan anak dimasukkan ke sekolah menengah kejuruan yaitu kekhawatiran tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan melihat kenyataan pada saat ini banyak lulusan pendidikan yang relatif lebih tinggi masih belum memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, orang tua mereka berpikiran bahwa anaknya masuk sekolah menengah kejuruan sudah dinilai cukup dan

mempunyai keyakinan bahwa kelak anaknya relatif lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan dengan anggapan lulusan sekolah menengah kejuruan sudah dibekali keterampilan yang memadai.

9. Berpikiran secara *Meritokratis* artinya pandangan yang menganggap bahwa golongan pekerja kerah biru, berstatus sosial rendah dan bekerja sebagai warga kelas dua, sebab mereka merupakan kelompok yang gagal dalam menempuh pendidikan formal secara tuntas sehingga harus mencari nafkah dengan mengandalkan tangan tanpa pikiran (Uwe dan Djajang, 1993:11). Ada pula pandangan sebagian dari masyarakat bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan terkesan untuk pekerja kasar yang seolah-olah merupakan pekerjaan kurang terhormat dibandingkan dengan pekerja dikantor-kantor yang mempunyai kebanggaan tersendiri.
10. Perusahaan yang masih enggan bahkan sulit untuk menerima siswa ikut praktek atau magang. Hal senada dikemukakan Moedjiarto dan Suyanto (Wena, 1996:96) bahwa sebagian industri (perusahaan) di Indonesia masih lemah dan belum kondusif dalam menopang pendidikan kejuruan. Sesuai dengan pendapat Uwe dan Djajang (1993:4) dalam bukunya Pendidikan Kejuruan di Indonesia mengatakan bahwa:

Dunia usaha pun umumnya masih menunjukkan enggan untuk terlibat dalam upaya-upaya pendidikan dan pelatihan, seperti terungkap dari hasil survai Bank Dunia dalam 'Skill Development Project' (SDP). Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 90 % dari seluruh perusahaan di Indonesia belum mau terlibat dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja profesional. Hanya 10 % yang menyadari pentingnya pendidikan kejuruan, dimana untuk itu pun belum ada peraturan pemerintah yang relevan.

Perusahaan-perusahaan besar, yang dapat bertahan dalam persaingan pasar karena mengandalkan produksi massal, tidak begitu berminat untuk berinvestasi dalam pendidikan kejuruan; bahkan mereka menolak mentah-mentah ajakan untuk berinvestasi dalam pendidikan kejuruan. Kelompok ini mencapai sekitar 90% dari seluruh perusahaan di Indonesia.

Keengganan perusahaan dalam berinvestasi pada pendidikan kejuruan dilapangan terlihat di beberapa perusahaan cukup sulit untuk menerima praktek magang siswa sekolah menengah kejuruan. Anggapan perusahaan tersebut antara lain : pertama, adanya praktek magang akan mengganggu jalannya perusahaan yaitu mengganggu kegiatan rutin. Kedua, menurut Wena (1996:95) sulitnya perusahaan untuk menerima peserta magang, diakibatkan terdapatnya *perbedaan tujuan* di mana perusahaan pada *profit oriented* yang berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi sedangkan pada pendidikan berpijak pada prinsip-prinsip pendidikan.

11. Penempatan siswa pada saat *praktek kerja* kurang tepat bahkan tidak sesuai dengan jurusan mereka, seperti jurusan penjualan berpraktek di perpustakaan atau siswa jurusan akuntansi hanya menjadi operator telepon pada sebuah instansi atau perusahaan. Pada saat praktek kerja di institusi atau perusahaan jarang mendapat bimbingan, kurang diberikan pengarahan, diskusi atau membahas studi kasus sesuai dengan materi pelajaran yang telah diterimanya di sekolah, praktek kerja industri hanya sekedar memenuhi tuntutan kurikulum atau formalitas saja.

12. Keterbatasan waktu membuat siswa kurang dalam segi keterampilan. Berdasarkan kurikulum tahun 1999 bahwa praktek kerja industri berkisar tiga sampai empat bulan dan berdasarkan pengalaman dilapangan waktu tiga sampai empat bulan itu relatif masih kurang, misalnya untuk program akuntansi dalam hal penerapan sistem akuntansi. Pada perusahaan-perusahaan umumnya sudah menggunakan sistem komputerisasi yang canggih sehingga segala macam siklus akuntansi menggunakan sistem komputer akuntansi. Bagi siswa yang magang untuk terjun ke sistem akuntansi komputer perlu waktu cukup lama dalam mengikuti praktek maupun latihan disebabkan di sekolah belum bahkan tidak belajar sistem komputer akuntansi. Ditambah lagi yang praktek bukan seorang, sehingga tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
13. Kebijakan pemerintah nampaknya kurang berpihak kepada pendidikan kejuruan. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada sekolah kejuruan disebabkan : Pertama, biaya operasional sekolah menengah kejuruan lebih besar 40 % dari sekolah menengah umum. (<http://www.dikmenjur.go.id>. Mei 2001). Kedua, kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya mendukung sekolah menengah kejuruan untuk kegiatan praktek diperusahaan atau instansi, karena apabila perusahaan menolak siswa untuk praktek belum ada sanksi yang tegas. Namun demikian pemerintah melalui kebijakan pajaknya apabila siswa ikut serta praktek pada perusahaan dan perusahaan mengeluarkan biaya untuk

pendidikan dan pelatihan, maka perusahaan diberikan perlakuan pajak yaitu pengurangan pajak (SK Menkeu No 770/KMK.04/1990, 14 Juli 1990).

Ketiga, kebijakan pemerintah berkenaan *dengan lulusan*. Lulusan sekolah menengah kejuruan kurang dapat leluasa untuk dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak heran kalau para orang tua siswa tidak ingin memasukan anaknya ke sekolah menengah kejuruan karena dianggap ruang gerak anaknya cukup terbatas.

14. Hambatan lingkungan yang menurut Suyanto (Wena, 1996:94) adanya dua lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan industri. Siswa di lingkungan sekolah bergaul dengan teman sebayanya sedangkan di lingkungan industri siswa bergaul dengan orang dewasa akibatnya berpengaruh terhadap interaksi siswa dalam proses belajar mengajar. Keadaan ini akan mempengaruhi terhadap persepsi pekerja perusahaan terhadap siswa peserta praktek, kemungkinan siswa dieksploitasi oleh instruktur yang saat itu menjadi pekerja. Kalau hal ini sering terjadi akan mengurangi makna pendidikan sistem ganda.
15. Siswa-siswa sekolah kejuruan akhir-akhir ini lebih banyak terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Informasi dari tayangan televisi, berita-berita dari majalah atau koran semakin mencuat ke permukaan. Parahnya berita di koran siswa sekolah kejuruan yang lebih banyak melakukan perkelahian terutama kalangan siswa SMK bidang keahlian Teknik walaupun tidak menutup kemungkinan sekolah umum ada yang terlibat. Berita ini semakin meyakinkan masyarakat betapa brutalnya siswa sekolah kejuruan.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan permasalahan ini sebagai berikut :

1. Benarkah popularitas sekolah menengah umum menjadi idola, sedangkan sekolah menengah kejuruan menjadi sekolah yang kurang diminati siswa pada umumnya?
2. Apakah dengan tidak memiliki sertifikasi keahlian menyebabkan lulusan sekolah kejuruan belum dipercaya mempunyai keahlian untuk siap kerja ?
3. Apakah lulusan sekolah kejuruan saat ini belum dapat bekerja sesuai dengan tuntutan dunia industri ?
4. Benarkah kurikulum (materi) sekolah menengah kejuruan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman ?
5. Apakah dengan sarana yang kurang mendukung mengakibatkan siswa kurang memiliki keterampilan sehingga menyebabkan tidak siap pakai untuk terjun ke dunia kerja ?
6. Benarkah akibat tenaga pengajar yang kurang memiliki keterampilan mengakibatkan kualitas siswa menjadi rendah dan tidak terampil ?
7. Apakah benar akibat pendapatan orang tua yang relatif rendah kurang menunjang terhadap kegiatan proses belajar-mengajar siswa ?
8. Apakah benar rendahnya pendapatan orang tua siswa menyebabkan minat siswa untuk memilih sekolah kejuruan ?

9. Apakah benar pemikiran Merokratis menyebabkan sekolah kejuruan merupakan sekolah yang mempunyai nilai prestise dan prestasi rendah dibandingkan dengan sekolah umum ?
10. Benarkah dengan sulitnya memasuki perusahaan atau instansi menyebabkan siswa menengah kejuruan rendah keterampilannya ?
11. Apakah selama ini sering penempatan siswa pada saat praktek kerja industri kurang tepat atau tidak sesuai dengan jurusan ?
12. Benarkah waktu untuk praktek kerja industri cukup terbatas ?
13. Apakah selama ini kebijakan pemerintah kurang memihak kepada sekolah kejuruan?
14. Apakah benar akibat lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan industri membuat makna pendidikan sistem ganda berkurang ?
15. Apakah benar akibat seringnya perkelahian pelajar oleh sekelompok siswa kejuruan menyebabkan sekolah kejuruan kurang diminati ?

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Peneliti hanya ingin membatasi masalah dalam hal waktu yang cukup terbatas dan penempatan siswa selama siswa melaksanakan praktek kerja di perusahaan. Apakah dengan waktu praktek cukup terbatas dan penempatan siswa di perusahaan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan siswa, sehingga apabila praktek kerja industri dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, maka praktek kerja industri dinilai sebagai praktek yang efektif. Adapun siswa yang dimaksud adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen.

1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui gambaran hasil praktek kerja industri yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan keterampilan terhadap siswa.
2. Ingin mengetahui kesesuaian antara teori di sekolah dengan praktek kerja di lapangan (praktek kerja industri).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis akan menambah wawasan dalam upaya meningkatkan kemampuan keilmuan. Penulis dapat mengetahui lebih dalam kesenjangan antara kurikulum (Sekolah Menengah Kejuruan bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen) dengan kenyataan yang ada.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas praktek kerja industri.
3. Pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap Sekolah Menengah Kejuruan bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
4. Dapat menilai kekurangan dan kelebihan dari siswa yang melaksanakan praktek kerja industri secara objektif dari sekolah yang bersangkutan.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Populasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kencana di Kotamadya Bandung, dengan sampel sebanyak empat puluh orang serta teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Prosedur pengambilan data menggunakan cara undian dan analisisnya menggunakan statistik nonparametrik dengan uji regresi berganda

1.6 LOKASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan Kencana Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen JL Soma Bandung. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 3 tahun ajaran 2001/2002